



PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN PADA SEKTOR PELAYANAN KESEHATAN, SEKTOR PENGEMBANGAN UMKM SERTA SEKTOR PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MALLUSETASI KOTA PARE-PARE

Haliwangka*¹, Mashur Razak*², Sylvia Sjarlis*³

¹. Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

e-mail : ¹haliwangka@gmail.com, ²mashur_razak@yahoo.co.id, ³sylvia.sjarlis2013@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan pemerintah kelurahan pada sektor pelayanan kesehatan, sektor pengembangan umkm serta sektor pelayanan pendidikan dan kebudayaan dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mallusetasi Kota Pare-Pare. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Kelurahan Mallusetasi Kota Pare-pare dengan waktu penelitian selama 2 bulan. Populasi yang digunakan yaitu seluruh kepala keluarga masyarakat Kelurahan Mallusetasi yang berjumlah 629. Teknik penarikan sampel menggunakan rumus *slovin* dengan memperoleh 86 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data menggunakan data primer. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial maupun simultan terbukti Peranan Pemerintah Kelurahan pada sektor Pelayanan Kesehatan, Pengembangan UMKM Serta Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan berpengaruh positif dan signifikan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mallusetasi Kota Pare-Pare. Penelitian ini menghasilkan nilai koefisien determinasi R^2 atau R Square adalah sebesar 0,208. Hasil ini berarti bahwa variabel Pelayanan Kesehatan, Pengembangan UMKM Serta Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan memiliki hubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 20,8%, dan sisanya 78,2% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Kata kunci : Pelayanan Kesehatan, Pengembangan UMKM, Pendidikan dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

This study aims to determine and analyze how the role of the sub-district government in the field of health services, MSME development as well as educational and cultural services in empowering the community in Mallusetasi Village, Pare-Pare City. The type of research used in this research is quantitative descriptive. This research was conducted in Mallusetasi Village, Pare-Pare City with a research time of 2 months. The population used is all the heads of families in the Mallusetasi village, totaling 629. The sampling technique used the Slovin formula to obtain 86 respondents. The type of data used in this research is quantitative data, while the data sources use primary data. The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis.

The results of this study prove that partially or simultaneously the role of the Village Government in the field of Health Services, MSME Development and Education and Cultural Services has a positive and significant impact on Community Empowerment in Mallusetasi Village, Pare-Pare City. This study resulted in the value of the coefficient of determination R^2 or R Square was 0.208. This result means that the variables of Health Services, MSME Development and Education and Cultural Services have a relationship with Community Empowerment by 20.8%, and the remaining 78.2% is explained by other reasons outside the model.

Keywords: Health Services, MSME Development, Education and Culture, Community Empowerment



PENDAHULUAN

Didalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Seperti halnya tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

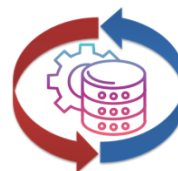
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pada hakekatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi keberdayaan tersebut, istilah pemberdayaan pun semakin akrab menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat yang tinggal di desa atau semi kota. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (power) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan (Widjajanti 2011). Pemberian kekuatan yang dimaksud adalah transformasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang diberikan melalui beberapa kegiatan. Cakupan kegiatan tersebut dapat berupa bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan (Mardikanto 2010). Tidak hanya kegiatan yang dilakukan menjadi poros pemberdayaan, namun partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan mempunyai pengaruh signifikan.

Pada umumnya pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara terencana melalui tahapan pembangunan yang tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan baru menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilakukan atas inisiatif dan dorongan dari masyarakat, jadi masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pembangunan Kelurahan merupakan pendukung utama keberhasilan pembangunan nasional dimana yang kita ketahui sebagian besar masyarakat Indonesia



ada didesa dengan berbagai profesinya, jadi sudah kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan, mengontrol lingkungannya dan dapat memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat didukung agar mampu meningkatkan kesejahterannya dengan mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.

Salah satu peranan penting kelurahan yaitu dapat menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat. Namun secara umum dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian kinerja pemberdayaan pemerintah pada masyarakat terkesan sebagai formalitas belaka, tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat menerima begitu saja pembangunan desa yang dijalankan sehingga sumber daya mereka tidak berkembang, Musrenbang desa atau kelurahan sebagai bagian pemberdayaan sumber daya masyarakat hanya sekadar tuntutan tugas semata.

Pemerintah kelurahan harus mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi pelaksanaan atau implementasi pada proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat akan terlaksana dengan baik bila peran pemerintah serta masyarakat dan partisipasinya juga baik.

Kelurahan memiliki peranan pada sektor pelayanan kesehatan, sebab pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor kesejahteraan masyarakat sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktivitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya pada sektor kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan, khususnya kepada rakyat miskin dan perempuan di seluruh Kelurahan. Pada dasarnya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah.

Selain peran pemerintah kelurahan pada sektor pelayanan kesehatan, kelurahan juga berperan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah kelurahan tersebut. Pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena UMKM merupakan salah satu penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Kehadiran UMKM tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga



dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor UMKM dapat melibatkan banyak orang dengan beragam usaha.

Pendidikan dan kebudayaan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat. Oleh karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan kesehatan, dan produktivitas. Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Hal yang perlu diperankan oleh pemerintah di Kelurahan dalam konteks pendidikan masyarakat adalah menstimulasi, mendorong, atau memotivasi masyarakat agar mereka mau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui dialog dan kampanye pendidikan. Sedangkan, dalam konteks sosial budaya Kelurahan dapat membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya bagi masyarakat (sarana keagamaan, kesenian, olah raga, kesehatan, dan lain lain serta melakukan pembinaan dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

Oleh karena itu peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan ini meliputi: (a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; (b) pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; (c) pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; (d) pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan/atau penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam rangka menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

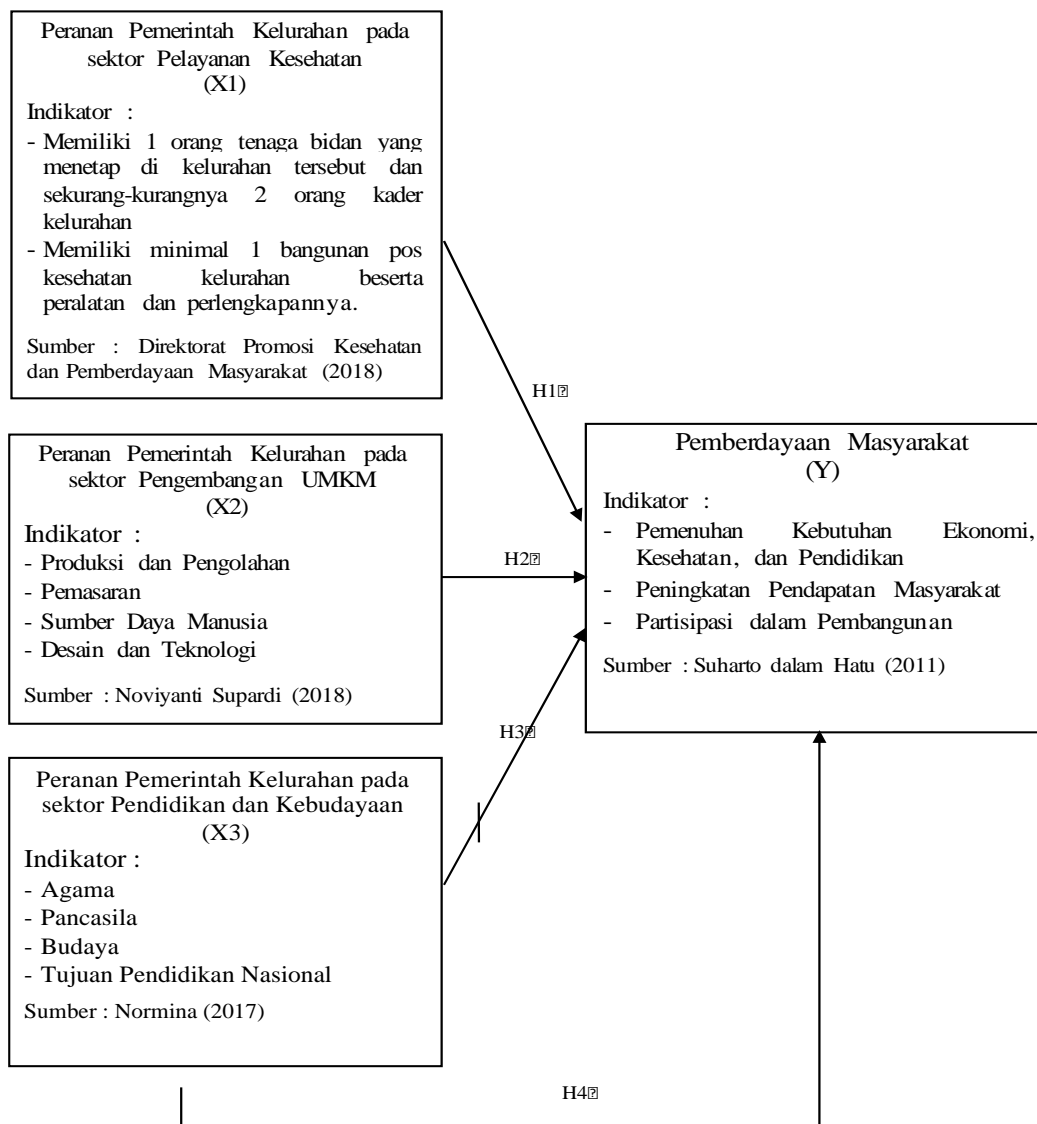
Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat yaitu Kelurahan Mallusetasi yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare, secara geografis Kelurahan Mallusetasi memiliki potensi cukup strategis dengan luas wilayah 0,30km² dengan mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah bermata pencaharian Wiraswasta, ASN dan Nelayan. Income perkapita masyarakat berkisar ± 3juta/bulan, terlebih kelurahan Mallusetasi merupakan daerah perkotaan dari Kecamatan Ujung. Melihat besarnya potensi kelurahan Mallusetasi untuk berkembang sangat disayangkan jika melihat masih terdapat masyarakat dalam kategori miskin sebanyak 92 jiwa dari 629 KK yang ada di Kelurahan Mallusetasi.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana seperti jalan setapak dan lampu lorong, serta pembanguanan sekretariat karang taruna yang dapat mengembangkan potensi pemberdayaan masyarakat, pembangunannya masih kurang maksimal yang banyak dikeluhkan masyarakat terkait pembangunannya yang tidak berkelanjutan dan kualitas pembangunannya yang masih kurang. Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang maksimal disebabkan anggaran yang kurang memadai, sesuai yang dikatakan salah seorang tokoh masyarakat di kelurahan Mallusetasi yang mengatakan bahwa : “Memang sulit di kelurahan karena kurangnya anggaran beda dengan didesa punya ADD, di kelurahan terbatas. bahkan yang saya dengar anggaran fisik

yang didanai oleh ADK sudah dihapuskan”. Senada dengan yang dikatakan salah satu staf kesekretariatan di Kelurahan Mallusetasi yang mengatakan bahwa : “Anggaran Dana Kelurahan memang sedikit dana itu hanya habis di biaya operasional saja”.

Berdasar pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian



Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat tiga hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga bahwa Peranan Pemerintah Kelurahan pada sektor Pelayanan Kesehatan berpengaruh signifikan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mallusetasi Kota Pare-Pare.
2. Diduga bahwa Peranan Pemerintah Kelurahan pada sektor Pengembangan UMKM berpengaruh signifikan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mallusetasi Kota Pare-Pare.



3. Diduga bahwa Peranan Pemerintah Kelurahan pada sektor Pendidikan & Kebudayaan berpengaruh signifikan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mallusetasi Kota Pare-Pare.
4. Diduga bahwa Peranan Pemerintah Kelurahan pada sektor Pelayanan Kesehatan, Pengembangan UMKM dan Pendidikan & Kebudayaan berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mallusetasi Kota Pare-Pare

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Dalam penelitian ini, metode survei digunakan dalam mengetahui tanggapan responden mengenai variabel-variabel penelitian yang dikemukakan dalam instrumen penelitian (kuesioner). Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang sesuai untuk suatu penelitian (Sugiyono, 2018). Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian rencana akan dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022. Adapun populasi yang digunakan yaitu seluruh kepala keluarga masyarakat Kelurahan Mallusetasi yang berjumlah 629. Berdasarkan pada teknik penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin*, maka dapat ditentukan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan 10% dalam pengumpulan data primer yaitu dilakukan terhadap 86 (dibulatkan) responden. Jenis data yang akan digunakan untuk kepentingan pengolahan data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket (*questionnaire*).

Teknik analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda yang didahului dengan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data penelitian uji hipotesis Pada pengujian hipotesis uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Kemudian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada taraf kepercayaan 0,05. Apabila nilai $F_{hitung} >$ dari nilai F_{tabel} , maka berarti variabel bebasnya secara serentak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikatnya, atau hipotesis diterima. Besarnya pengaruh itu dapat dilihat pada nilai R^2 . Uji T berfungsi untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya signifikan atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} masing-masing variabel bebas dengan nilai t_{tabel} pada taraf kepercayaan 0,05.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer IBM *SPSS for Windows* versi 25. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya dijelaskan pada Tabel 1 berikut ini :



Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.036	2.107		1.915	.059
Pelayanan Kesehatan (X1)	.155	.070	.221	2.195	.031
Pengembangan UMKM (X2)	.180	.088	.216	2.053	.043
Pendidikan dan Kebudayaan (X3)	.186	.091	.219	2.036	.045

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 4,036 + 0,155 X_1 + 0,180 X_2 + 0,186 X_3$$

Dari persamaan model regresi diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 4,036 (Positif) artinya, jika variabel bebas, yaitu pelayanan kesehatan (X1), pengembangan UMKM (X2) serta pendidikan dan kebudayaan (X3) nilainya tetap atau konstan, maka variabel terikat, yaitu pemberdayaan masyarakat (Y) akan naik sebesar 4,036 satuan.
2. Nilai koefisien variabel pelayanan kesehatan (X1) sebesar 0,155 artinya jika pelayanan kesehatan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pemberdayaan masyarakat akan meningkat sebesar 0,155 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara pelayanan kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat.
3. Nilai koefisien variabel pengembangan UMKM (X2) adalah sebesar 0,180 artinya jika variabel pengembangan UMKM mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pemberdayaan masyarakat juga akan meningkat sebesar 0,180 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara pengembangan UMKM dengan pemberdayaan masyarakat.
4. Nilai koefisien variabel pendidikan dan kebudayaan (X3) adalah sebesar 0,186 artinya jika pendidikan dan kebudayaan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pemberdayaan masyarakat juga akan ikut meningkat sebesar 0,186 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara pendidikan dan kebudayaan dengan pemberdayaan masyarakat.

Pengujian hipotesis secara parsial

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dalam regresi linier berganda. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , maka hipotesis diterima begitupun sebaliknya. Dalam penelitian ini untuk memperoleh nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel t statistik dengan ketentuan $df = n - k$ atau $86 - 3 = 83$. Dengan taraf signifikan 0,05, dan uji 2 sisi. Diperoleh hasil $t_{tabel} = 1,989$.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 , maka hasil dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada variabel Pelayanan Kesehatan (X1), diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,195. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,195 > 1,989$), maka dapat di simpulkan



- bahwa hipotesis diterima, variabel independen Pelayanan Kesehatan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y).
2. Pada variabel Pengembangan UMKM (X2), diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,053. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,053 > 1,989$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Pengembangan UMKM (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y).
 3. Pada variabel Pendidikan dan Kebudayaan (X3), diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,036. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,036 > 1,989$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Pendidikan dan Kebudayaan (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y).

Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) variabel bebas terhadap variabel terikat dalam regresi linier berganda. Jika F-hitung $>$ F-tabel dengan signifikan $<$ 0,05 maka dapat dinyatakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan dan begitupun sebaliknya jika Fhitung $<$ Ftabel dapat dinyatakan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan. Besarnya nilai F-tabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$, pada tabel f statistik diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,716. Hasil uji F (simultan) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	283.484	3	94.495	23.537	.000 ^b
	Residual	104.383	26	4.015		
	Total	387.867	29			

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai F-hitung sebesar 7,187 dan nilai signifikansinya 0,00. Artinya nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($7,187 > 2,716$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,00 < 0,05$). Sehingga hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Pelayanan Kesehatan (X1), Pengembangan UMKM (X2) serta Pendidikan dan Kebudayaan (X3) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y).

Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen menjadi sangat terbatas. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.456 ^a	.208	.179	1.02521	1.681

a. Predictors: (Constant), Pendidikan dan Kebudayaan (X3), Pelayanan Kesehatan (X1), Pengembangan UMKM (X2)

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perolehan nilai koefisien determinasi R² atau R Square adalah sebesar 0,208. Hasil ini berarti bahwa variabel Pelayanan Kesehatan (X1), Pengembangan UMKM (X2) serta Pendidikan dan Kebudayaan (X3) memiliki hubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat (Y) sebesar 20,8%, dan sisanya 78,2% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah Kelurahan pada sektor Pelayanan Kesehatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil bahwa jika pelayanan kesehatan mengalami peningkatan maka pemberdayaan masyarakat juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara peran pemerintah kelurahan pada sektor pelayanan kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat pada kelurahan Mallusetasi. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel pelayanan kesehatan, diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat di simpulkan bahwa variabel independen peran pemerintah kelurahan pada sektor pelayanan kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan dalam pemberdayaan masyarakat pada kelurahan Mallusetasi.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel peran pemerintah kelurahan pada sektor pelayanan kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam pemberdayaan masyarakat pada kelurahan Mallusetasi. Hal ini bermakna bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Mallusetasi dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan, yaitu dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, dan merealisasikan berbagai macam program kesehatan, seperti memiliki tenaga bidan yang berkompeten dan senantiasa membantu keperluan warga saat dibutuhkan serta adanya upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat untuk menanggulangi penyakit menular telah membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan ikut serta berpartisipasi.

Banyak model dan strategi pemberdayaan masyarakat yang telah dikembangkan, khususnya di bidang kesehatan. Kelurahan Mallusetasi sendiri dengan beberapa model pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia (UKBM), antara lain: Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan klasifikasi: Pratama, Madya, Purnama maupun Mandiri, Pos Pembinaan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia); Kelurahan/Desa Siaga aktif, Pondok Bersalin (Polindes dan KBKIA), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Taman Obat Keluarga (TOGA), Pemantauan dan Stimulasi Perkembangan Balita (PSPB), Dana Sehat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak



dibidang kesehatan.

Temuan penelitian ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Defri *et al* (2014) bahwa dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai maka seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, masyarakat juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesehatan, dan masyarakat akan memahami pola hidup sehat. Pemberian pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paradigma pelayanan kesehatan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Restuastuti *et al* (2017) bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, antara lain efektivitas dari komponen intervensi, sasaran kelompok masyarakat dan lokasi intervensi, sesuai dengan Kepmenkes Republik Indonesia tahun 2010 tentang Pedoman umum pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif, bahwa petugas dan kader yang bekerja mengembangkan kegiatan dimasyarakat seperti posyandu dan desa siaga adalah orang yang sama. Perlu upaya penyamaan kebijakan termasuk penamaan program desa siaga yang umumnya belum banyak dikenal oleh para pembuat kebijakan didaerah terlebih lagi masyarakat.

Peranan Pemerintah Kelurahan pada sektor Pengembangan UMKM dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika pengembangan UMKM mengalami peningkatan maka pemberdayaan masyarakat juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara pengembangan UMKM dengan pemberdayaan masyarakat. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel pengembangan UMKM, dimana diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat di simpulkan bahwa variabel independen peran pemerintah kelurahan pada sektor pengembangan UMKM secara parsial berpengaruh signifikan dalam pemberdayaan masyarakat pada kelurahan Mallusetasi.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel peran pemerintah kelurahan pada sektor pengembangan UMKM memiliki pengaruh Positif dan signifikan dalam pemberdayaan masyarakat pada kelurahan Mallusetasi. Hal ini mengandung artian bahwa upaya yang dilakukan pemerintah di kelurahan Mallusetasi kepada masyarakat untuk memberdayakan UMKM seperti memberikan fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan kemampuan serta daya saing UMKM mampu meningkatkan kualitas sumberdaya atau khususnya pengusaha UMKM di kelurahan Mallusetasi.

Dalam mengembangkan pelaku UMKM pemerintah kelurahan Mallusetasi pada aspek produksi dan pengolahan telah memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk masyarakat. Selain itu, dari aspek pemasaran sendiri pemerintah kelurahan Mallusetasi memberikan dukungan promosi, jaringan pemasaran serta distribusi. Adapun dari aspek SDM seperti, pelatihan keterampilan teknis dan manajerial, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis. Kemudian, pemerintah kelurahan Mallusetasi juga kini tengah berupaya meningkatkan kemampuan usaha mikro dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu serta mendorong usaha

mikro untuk memperoleh sertifikat kelayakan intelektual.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Kornita *et al* (2020) bahwa adanya kegiatan pengabdian berupa penyuluhan dan pembinaan, dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya atau khususnya pengusaha UMKM di Kelurahan dengan fokus memberikan solusi bagi permasalahan keuangan atau khususnya tentang manajemen keuangan, serta mendiskusikan strategi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan. Sehingga akan membuat pelaku usaha UMKM akan lebih mampu mengembangkan usahanya secara lebih profesional, efisien dan efektif bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat yang juga dapat berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun teori yang mendukung penelitian ini, yaitu Handini dan Suksesi (2019) yang mengatakan, bahwa pelatihan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan manajerial pada masyarakat pelaku usaha UMKM, oleh karena itu pelatihan ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses transformasi di bidang manajerial, dengan harapan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha UMKM dapat mengelola usahanya dengan baik melalui implementasi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang modern dan *applicable*, dibidang Keuangan, Asets Rumah Tangga dan Interaksi sosial.

Peranan Pemerintah Kelurahan pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika pendidikan dan kebudayaan mengalami peningkatan, maka pemberdayaan msyarakat juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara pendidikan dan kebudayaan dengan pemberdayaan msyarakat. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel peran pemerintah kelurahan pada sektor pendidikan dan kebudayaan dimana dtekah diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat di simpulkan bahwa variabel pendidikan dan kebudayaan secara parsial berpengaruh signifikan dalam pemberdayaan masyarakat pada kelurahan Mallusetasi.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel peran pemerintah kelurahan pada sektor pendidikan dan kebudayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam pemberdayaan masyarakat pada kelurahan Mallusetasi. Hal ini dapat mengidikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Mallusetasi dalam memberdayakan masyarakatnya melalui pendidikan dan kebudayaan telah memperhatikan perkembangan masyarakatnya yang berusia muda untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar masyarakatnya yang masih berusia muda tersebut cukup cakap melaksanakan tugas dalam hidupnya sendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Upaya pemerintah kelurahan Mallusetasi dalam mengembangkan pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat dari adanya dukungan kegiatan- kegiatan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat, selalu memperkenalkan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai pancasila kepada masyarakat, serta menyediakan taman baca atau perpustakaan mini bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah kelurahan Mallusetasi juga senantiasa mendorong, memotivasi dan mengembangkan pendidikan budaya dan karakter masyarakat sesuai tujuan pendidikan nasional.

Hasil penelitian penelitian ini telah sesuai dengan pendapat Retno *et al* (2015) bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan guna memperbaiki kualitas hidup sumber daya manusia (SDM) dengan cara membuat mereka berdaya,



maka dalam menyikapi hal tersebut dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang dapat dimulai dari pendidikan dan kebudayaan. Pendekatan melalui pendidikan dan kebudayaan ini pada praktiknya di masyarakat banyak mengambil peran untuk pemberdayaan masyarakat, sebab pada hakikatnya pendidikan dan kebudayaan masyarakat memiliki prioritas pada individu dari segi ekonomi, geografis, dan sosial budaya.

Lebih lanjut Lestari dan Subekti (2019) mengemukakan, bahwa cara dalam memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan pendidikan dan kebudayaan adalah dapat dengan melalui program membaca, karena dengan adanya sarana membaca memiliki peran dalam menyediakan informasi bagi masyarakat. Pemberdayaan melalui program ini berhubungan dengan bidang pendidikan dan kebudayaan. Sarana fisik membaca seperti taman baca atau perpustakaan adalah sebuah tempat yang menjabarkan ilmu pengetahuan dan hasil-hasil pemikiran manusia dengan tidak henti-hentinya dan merupakan tempat belajar seumur hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kelurahan pada sektor Pelayanan Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Mallusetasi Kota Parepare. Hal tersebut membuktikan hipotesis pertama dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
2. Peran Pemerintah Kelurahan pada sektor Pengembangan UMKM berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Mallusetasi Kota Parepare. Hal tersebut membuktikan hipotesis kedua dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
3. Peran Pemerintah Kelurahan pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Mallusetasi Kota Parepare. Hal tersebut membuktikan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
4. Peran Pemerintah Kelurahan pada sektor Pelayanan Kesehatan, sektor Pengembangan UMKM serta sektor Pendidikan dan Kebudayaan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Mallusetasi Kota Parepare. Hal tersebut membuktikan hipotesis keempat dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah kelurahan Mallusaetasi agar tetap mempertahankan dan lebih aktif lagi dalam meningkatkan perannya dalam memberdayakan potensi masyarakat, tidak hanya pada bidang kesehatan, pengembangan umkm serta pendidikan dan kebudayaan namun pada bidang lain juga. Inisiatif dan tanggungjawab tiap-tiap pengurus dan perangkat kelurahan lebih ditingkatkan dalam rangka membantu masyarakat mengembangkan potensi diri agar hasilnya benar-benar terlihat nyata, sebab dalam penelitian ini telah terbukti bahwa variabel tersebut mampu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

2. Untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan dapat menambahkan variabel lainnya seperti lingkungan, sosial budaya, pariwisata, dll yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dan menggunakan metode analisis lain serta disarankan memperluas jangkauan penelitian sehingga hasil penelitian yang didapat memiliki dampak yang lebih luas dan mendapatkan manfaat yang lebih baik untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga Pandji. 2017. Manajemen bisnis. Cetakan Ke-12. Jakarta: Reineka Cipta.
- Abu Huraerah. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Humaniora.Bandung.
- Abdurrohman, Ari. 2017. Strategi Pengembangan Usaha, Kualitas Produk, Keberhasilan Usaha, Dan Analisis SWOT. Bandung : Alfabeta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Ahmadi, Abu. 2004. Sosiologi Pendidikan. Rineka Cipta: Jakarta.
- Affandi, Anwar dan Setia Hadi. 1996. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Prisma, Jakarta.
- Aprilia Theresia, Krishna S Andini, Nugraha, Totok Mardikanto, 2015, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alfabeta, Bandung.
- Beratha, I Nyoman. 1982. Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Elly M. Setiadi, dkk. 2006. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Kencana: Jakarta.
- Defri, D., Saleh, A. B., & Adiwidjaja, I. (2014). Upaya Pemerintah Kelurahan dalam Rangka Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi, 3(2), 42374.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional (2014) Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dewantara, Ki Hadjar. 2011. Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama Pendidikan.Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handini, Sri,. & Sukesu, S. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Pengembangan UMKM Wilayah Pesisir.

- Hikmat, Harry. (2001). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press (HUP), Bandung.
- Ihsan, Fuad. 2005. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Inu Kencana Syafie. 1994. Etika Pemerintahan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta: Jakarta.
- Kornita, S. E., Basri, S., Restu, R., Isbah, U., & Desweni, S. P. (2020, December). Pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha UMKM di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. In Unri Conference Series: Community Engagement (Vol. 2, pp. 494-497).
- Lestari, D., & Subekti, S. (2019). Peran Perpustakaan Jalanan Semarang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(3), 431-440.
- Maskun, Sumitro. 1993. Pembangunan Masyarakat Desa. Media widya Mandala, Yogyakarta.
- Muhidin, S. A., & Abdurahman, M. (2017). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian* (Cetakan 3). CV Pustaka Setia.
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Edisi Pertama). Kencana.
- Normina. 2017. Pendidikan Dalam Kebudayaan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*. Vol. 15, No. 28. Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Putri, Kartika. dkk. 2014. Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha, Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha (Studi Pada Sentral Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur), *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Dipenorogo Semarang*.
- Prasadja, Buddy. 1982. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. CV.Rajawali, Jakarta.
- Prijono, Onny S.& A.M.W. Pranarka (eds.) 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Restuastuti, T., Zahtamal, Z., Chandra, F., & Restila, R. (2017). Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Melayu*, 1(1), 14-19.
- Retno, S. S., Rohmiyati, Y., & Husna, J. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan: studi kasus di rumah pintar “Sasana Ngudi Kawruh” Kelurahan Bandarharjo-Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 4(2), 157-166.
- Siagian, P. Sondang. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

- Siagian, Sondang P. 2008. Adminitrasi Pembangunan. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Supardi, Noviyanti. 2018. Pengaruh Pembiayaan terhadap Pengembangan Usaha Mikro (Studi: Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari) IAIN Kendari.
- Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.
- Syarifin, Jubaedah Dedah. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. CV.Pustaka Setia, Bandung.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
- Tulus Tambunan. 2016. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Bandung : Pustaka Setia.
- Usman, Sunyoto. 1998. Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wrihatnolo, Randy R.& Riant Nugroho D. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Pertama). Kencana.